

**KEWENANGAN PENGAMBILALIHAN BANK DALAM RESOLUSI
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI BENTUK
PELINDUNGAN TERHADAP HAK NASABAH DAN PEMEGANG
SAHAM MINORITAS**

Adinda Amelia¹, Irna Nurhayati²

INTISARI

Penelitian ini membahas pelaksanaan resolusi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap hak nasabah dan pemegang saham. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, LPS memperoleh perluasan kewenangan sebagai *risk minimizer* dalam penyelesaian bank bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi perlindungan terhadap nasabah dan pemegang saham oleh LPS serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui kajian peraturan perundang-undangan terkait resolusi bank oleh LPS dan wawancara dengan narasumber dari LPS. Bahan penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif untuk menilai efektivitas kewenangan LPS dalam pengambilalihan bank sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah dan pemegang saham.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan resolusi oleh LPS telah dilakukan melalui berbagai mekanisme perlindungan, antara lain pengembalian klaim simpanan secara tepat waktu, pembentukan Tim Likuidasi, dan pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk menyuntikkan dana dalam skema *open bank assistance*. Perlindungan terhadap pemegang saham juga diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak atas sisa aset dan prinsip pertanggungjawaban terbatas sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga menemukan empat tantangan utama yang dihadapi LPS, yaitu peningkatan digitalisasi perbankan, intensitas kerja sama bank dengan fintech, rendahnya pemanfaatan *core banking system* oleh BPR, serta risiko fraud akibat lemahnya tata kelola. Penelitian merekomendasikan perumusan kebijakan perlindungan simpanan yang lebih adaptif, peningkatan literasi publik, evaluasi berkala terhadap skema penyelamatan bank, dan penguatan koordinasi antar lembaga guna memperkuat sistem penjaminan dan resolusi bank di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Resolusi Bank, Perlindungan Nasabah, Perlindungan Pemegang Saham

¹ Mahasiswa Strata 1 (S-1) pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE AUTHORITY OF BANK RESOLUTION TAKEOVER BY THE INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (LPS) AS A FORM OF PROTECTION FOR THE RIGHTS OF DEPOSITORS AND MINORITY SHAREHOLDERS

Adinda Amelia¹, Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This research examines the implementation of bank resolution by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) in relation to the protection of the rights of depositors and shareholders. Since the enactment of Law No. 4 of 2023, LPS has been granted expanded authority as a risk minimizer in addressing troubled banks. The purpose of this study is to analyze the implementation of depositor and shareholder protection by LPS and to identify the challenges encountered in its execution.

This study employs a descriptive method with a normative-empirical approach, combining an examination of banking resolution regulations with interviews conducted with LPS representatives. The research materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through literature review and interviews. Data were analysed qualitatively using an inductive method to assess the effectiveness of LPS's authority in bank resolution as a means of protecting depositors and shareholders.

The findings reveal that LPS has carried out bank resolution through several protection mechanisms, including the timely settlement of deposit insurance claims, the establishment of liquidation teams, and the provision of opportunities for shareholders to inject capital under the open bank assistance scheme. Shareholder protection is also reflected in the recognition of residual asset rights and the principle of limited liability as regulated under the Company Law. Furthermore, the study identifies four major challenges faced by LPS: increasing digitalization in the banking sector, intensifying collaboration between banks and fintech companies, the limited use of core banking systems by rural banks (BPR), and fraud risks resulting from weak governance. The study recommends the formulation of a more adaptive deposit insurance policy, enhancement of public financial literacy, periodic evaluation of bank rescue schemes, and strengthened inter-agency coordination to reinforce Indonesia's deposit insurance and bank resolution framework.

Keywords: Indonesia Deposit Insurance Corporation, Bank Resolution, Protection of Depositors, Protection of Bank Shareholders

¹ Undergraduate Student (Bachelor's/S-1) at the Department of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer at Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada